

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



KABUPATEN BARITO UTARA

2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tahun 2024 ini bermanfaat sebagai bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja untuk tahun yang akan datang.

Muara Teweh, Juni 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,



HI. SRIHARTATI, S.Pi., M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 200604 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.3. Program dan kegiatan.....	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara merupakan Perencanaan terhadap program dan kegiatan yang dibuat berdasarkan misi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yang bertujuan meningkatkan pembinaan administrasi kepegawaian dan kualitas diklat, meningkatkan sarana dan prasarana kerja, yang akan mewujudkan perilaku disiplin kerja aparatur menuju peningkatan kesejahteraan pegawai dengan menjalankan sumber daya aparatur yang transparan dan bertanggung jawab sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dalam memberikan pelayanan prima sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih. Kualitas dokumen rencana kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja (RENJA) ini merupakan cerminan kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6).
21. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38

tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

22. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara 2024 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Barito Utara

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO
UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022.

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp. 6.218.244.931,- (enam milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program, kegiatan dan subkegiatan tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 5.494.966.863,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 88,37 persen.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dapat dirincikan realisasi keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.2

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.998.952.931	3.473.088.782	86,70	525.864.149
1	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	17.000.000	15.750.000	92,65	1.250.000
	1. Koordinasi dan penyesunan Dokumen RKA-SKPD	8.500.000	7.250.000	85,29	1.250.000
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.500.000	8.500.000	100,00	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.918.550.281	2.452.211.402	76,69	466.338.879
	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.799.030.281	2.336.191.402	83,46	462.838.879
	2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	109.020.000	109.020.000	100,00	0
	3. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.500.000	-	0	3.500.000
	4. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	3.500.000	3.500.000	100,00	0
	5. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	3.500.000	3.500.000	100,00	0
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	35.000.000	24.250.000	69,29	10.750.000
	1. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	909.500.000	894.875.000	98,39	14.625.000
4.	administrasi umum perangkat daerah	547.027.125	536.581.462	98,09	10.445.663
	1. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.851.500	7.851.500	100,00	0
	2. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.956.250	91.706.250	99,73	250.000
	3. penyediaan bahan logistik kantor	27.918.000	27.918.000	100,00	0
	4. penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.887.375	16.477.750	63,65	9.409.625
	5. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.800.000	7.680.000	98,46	120.000
	6. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	385.614.000	384.947.962	99,83	666.038
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.000.000	46.000.000	100,00	0
	1. pengadaan aset tetap lainnya	46.000.000	46.000.000	100,00	0
6.	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	345.483.750	327.535.798	94,80	17.947.952

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
	1. penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000	20.000.000	100,00	0
	2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87.100.000	79.763.298	91,58	7.336.702
	3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19.080.000	11.632.500	60,97	7.447.500
	4. penyediaan jasa pelayanan umum kantor	219.303.750	216.140.000	98,56	3.163.750
7.	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89.891.775	70.760.120	78,72	19.131.655
	1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	8.000.000	4.759.100	59,49	3.240.900
	2. pemeliharaan aset tetap lainnya	81.891.775	66.001.020	80,60	15.890.755
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.219.292.000	2.021.878.081	91,10	197.413.919
8.	pengadaan, pemberhentian dan informasi kepgawaian ASN	423.224.500	405.991.446	95,93	17.233.054
	1. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	68.525.000	66.331.200	96,80	2.193.800
	2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	40.380.000	38.403.000	95,10	1.977.000
	3. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	29.798.250	29.778.250	99,93	20.000
	4. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	75.246.000	75.243.000	100,00	3.000
	5. Fasilitasi lembaga profesi ASN	9.994.000	7.430.800	74,35	2.563.200
	6. Pengelolaan data kepegawaian	167.339.250	156.878.296	93,75	10.460.954
	7. Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	31.942.000	31.926.900	99,95	15.100
9.	Mutasi dan promosi ASN	245.477.000	225.877.790	92,02	19.599.210
	1. Pengelolaan Mutasi ASN	30.116.000	28.946.650	96,12	1.169.350
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	99.613.750	99.552.640	99,94	61.110
	Pengelolaan promosi ASN	115.747.250	97.378.500	84,13	18.368.750
10.	Pengembangan kompetensi ASN	1.260.487.000	1.149.669.217	91,21	110.817.783
	1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN	157.989.250	57.151.325	36,17	100.837.925
	2. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	9.965.000	9.613.500	96,47	351.500
	3. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	630.384.750	620.772.792	98,48	9.611.958
	4. Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	462.148.000	462.131.600	100,00	16.400
11.	penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	290.103.500	240.339.628	82,85	49.763.872
	1. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	187.251.000	186.491.342	99,59	759.658
	2. Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa	20.036.000	16.765.969	83,68	3.270.031

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
	aparatur				
	3. Pembinaan disiplin ASN	47.700.875	13.965.500	29,28	33.735.375
	4. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	35.115.625	23.116.817	65,83	11.998.808
	JUMLAH	6.218.244.931	5.494.966.863	88,37	723.278.068

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adapun hasil evaluasi terhadap target dan realisasi capaian indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Barito Utara

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 03		KEPEGAWAIAN								
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Program pelayanan Administrasi perkantoran								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
5 03 01 2 01										
5 03 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA/DPA SKPD dan RKPA /DPPA SKPD	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 dokumen	100%

5	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	15 dokumen	100%
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD								
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
5	03	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan berjalan baik	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
5	03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
5	03	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%
5	03	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Prognosis realisasi anggaran	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur								
5	03	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terpenuhiya pakaian dinas	96 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0%	90 jenis	90 jenis	100%
5	03	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	PNS Daerah yang mengikuti diklat teknis	25 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%	27 kali	47 kali	100%
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum kantor								
5	03	01	2	06	01	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya komponen listrik/penerangan kantor	3 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	100%
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan	Terpenuhiya ATK	3 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	100%

5	03	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon berfungsi dengan baik	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
5	03	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kerja berfungsi dengan baik	3 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	100%
5	03	01	2	08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor yang bersih dan kondusif	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah PD								
5	03	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terperuhnya perizinaan kendaraan dinas/operasional	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
5	03	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gedung kantor yang aman, kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
5	03	02				Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Program Kepegawaian Daerah								
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	CPNS Daerah yang diterima sesuai formasi dan kompetensi	650 Orang	246 Orang	246 Orang	246 Orang	100%	200 Orang	692 Orang	100%
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terperuhnya Kebutuhan ASN Daerah	650 Orang	246 Orang	246 Orang	246 Orang	100%	200 Orang	692 Orang	100%
5	03	02	2	01	04	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Pembekalan CPNS berjalan dengan lancar	650 Orang	246 Orang	246 Orang	246 Orang	100%	200 Orang	692 Orang	100%
5	03	02	2	01	06	Koordinasi pelaksanaan	Penyelesaian usulan	441 Orang	131 Orang	131 Orang	131 Orang	100%	139 Orang	401 Orang	91 %

						Aparatur										
5	03	02	2	04	06	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	PNS yang berprestasi penerima penghargaan	165 PNS	131 PNS	131 PNS	131 PNS	98 %	50 PNS	312 PNS	100%	
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pengambilan sumpah janji PNS	9 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	22 %	
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS berjalan dengan lancar	9 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	67 %	
5	03	02	2	04	09	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Tertindakannya pelayanan proses izin perceraian pegawai	18 PNS	5 PNS	5 PNS	5 PNS	100%	5 PNS	15 PNS	83 %	
5	03	02	2	04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Tertindakannya Evaluasi Disiplin ASN	4 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25 %	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dan dapat disimpulkan bahwa target indikator yang telah ditetapkan terdapat beberapa target indikator baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan dengan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah ASN yang sudah terlayani menggunakan Aplikasi berbasis elektronik
2.	Meningkatkan kesejahteraan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan reward dari Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara tersusun dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara

No.	Indikator	Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah ASN yang sudah terlayani menggunakan Aplikasi berbasis elektronik											
	a. Aplikasi e-kinerja			3.646 ASN	4.136 ASN	4.157 ASN	4.163 ASN	3.646 ASN	4.204 ASN	4.157 ASN	4.163 ASN	
	b. Aplikasi SIASN			3.813 ASN	4.136 ASN	4.157 ASN	4.163 ASN	3.813 ASN	4.204 ASN	4.157 ASN	4.163 ASN	
	c.Aplikasi e-formasi			1.415 ASN	1.450 ASN	1.500 ASN	1.550 ASN	1.415 ASN	3.424 ASN	1.500 ASN	1.550 ASN	
	d. SIJAPTI			74 ASN	94 ASN	114 ASN	134 ASN	74 ASN	94 ASN	114 ASN	134 ASN	
	e. SIMPEGNAS			0 ASN	4.136 ASN	4.157 ASN	4.163 ASN	0 ASN	4.204 ASN	4.157 ASN	4.163 ASN	
	f. SIAPEG			30 ASN	5 ASN	6 ASN	8 ASN	30 ASN	5 ASN	6 ASN	8 ASN	
	g.TOS TASPEN			5 ASN	10 ASN	15 ASN	20 ASN	5 ASN	0 ASN	15 ASN	20 ASN	
	h.SIOLA KEMENDAGRI			74 ASN	79 ASN	84 ASN	89 ASN	74 ASN	6 ASN	84 ASN	89 ASN	
2.	Persentase ASN yang mendapatkan reward dari Pemerintah Daerah			99%	73%	85%	97%	99,7%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.

Berkaitan dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara, Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan SDM tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu sendiri yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur masihlah belum terlaksana secara optimal. PNS pada dasarnya selalu ingin mendapat pelayanan yang terbaik, namun terkadang keinginan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik kadang teknisnya rumit, mahal, tidak pasti, lambat dan

melelahkan. Standar layanan publik yang diharapkan adalah dapat menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu kemanfatan, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan dan kepentingan umum. Kualitas dari pelayanan publik merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja seorang pegawai. Oleh karena itu, kinerja dari lembaga penyedia pelayanan publik menjadi satu bagian penting dalam mewujudkan tujuan negara.

Salah satu contoh lembaga kepegawaian di Kabupaten Barito Utara yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara. Sebelum penggunaan sistem aplikasi e-kinerja, pengukuran kinerja pegawai di BKPSDM dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Di zaman sekarang, penilaian prestasi kinerja PNS dengan cara tertulis sudah tidak efektif lagi. Hal ini dikarenakan penilaian dengan model lama ini cenderung bersifat formalitas, subyektif, serta kurang akurat dalam mengukur kualitas dan kuantitas kinerja para pegawai. Dengan upaya memecahkan masalah penilaian yang berpatokan pada kehadiran menjadi lebih pada kinerja pegawai..

Dari uraian yang telah dikemukakan mengenai kondisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara saat ini, maka yang menjadi perhatian atau fokus utama yaitu Meningkatnya pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dari identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, isu strategis yang perlu mendapat perhatian terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yaitu :

1. Peningkatan pelayanan publik khususnya terhadap urusan kepegawaian bagi ASN berbasis elektronik.
2. Peningkatan kesejahteraan ASN Kabupaten Barito Utara menggunakan skema Reward and Punishment bagi ASN Berprestasi.

Beberapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mencapai tujuannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur di daerah memerlukan sistem yang baku terhadap penerapannya secara nasional dan terintegrasi;
2. Rumusan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur merupakan kegiatan strategis dalam memberikan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
3. Ketersediaan dan kesiapan Badan Litbang, institusi Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya untuk mendukung pelaksanaan mandat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara;
4. Sumber daya manusia dari lulusan berbagai disiplin ilmu lebih banyak saat ini.

Beberapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mencapai tujuannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur di daerah memerlukan sistem yang baku terhadap penerapannya secara nasional dan terintegrasi;
2. Rumusan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur merupakan kegiatan strategis dalam memberikan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
3. Ketersediaan dan kesiapan Badan Litbang, institusi Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya untuk mendukung pelaksanaan mandat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara;
4. Sumber daya manusia dari lulusan berbagai disiplin ilmu lebih banyak saat ini.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan undang-undang yang berlaku diperlukan tersediannya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review terhadap rancangan Awal RKPD sesuai pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Barito Utara tersebut pada Lampiran tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024.

TABEL 2.4
Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan pada RENJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Muara Teweh	Terlaksananya Program pelayanan Administrasi perkantoran		6.265.550.350	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Muara Teweh	Terlaksananya Program pelayanan Administrasi perkantoran		6.265.550.350	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Teweh	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		23.761.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Teweh	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		23.761.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Teweh	Tersusunnya RKA SKPD dan RKPA SKPD	4 dokumen	11.880.650	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Teweh	Tersusunnya RKA SKPD dan RKPA SKPD	2 dokumen	11.880.650	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Muara Teweh	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	5 dokumen	11.880.650	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Muara Teweh	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	5 dokumen	11.880.650	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Teweh	Tersedianya administrasi keuangan PD		4.390.141.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Teweh	Tersedianya administrasi keuangan PD		4.390.141.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Teweh	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	12 bulan	4.216.285.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Teweh	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	12 bulan	4.216.285.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Teweh	pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan berjalan baik	12 bulan	159.180.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Teweh	pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 bulan	159.180.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Muara Teweh	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	4.892.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Muara Teweh	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	4.892.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Muara Teweh	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	2 dokumen	4.892.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Muara Teweh	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	2 dokumen	4.892.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran	Muara Teweh	Tersusunnya Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	4.892.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran	Muara Teweh	Tersusunnya Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	4.892.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Muara Teweh	Meningkatnya disiplin aparatur		84.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Muara Teweh	Meningkatnya disiplin aparatur		84.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Muara Teweh	Terpenuhinya pakaian dinas	32 stel	44.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Muara Teweh	Terpenuhinya pakaian dinas	32 stel	44.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Muara Teweh	PNS Daerah yang mengikuti diklat teknis	7 kali	40.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Muara Teweh	PNS Daerah yang mengikuti diklat teknis	8 kali	40.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Teweh			632.211.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Teweh			632.211.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Muara Teweh	Terpenuhinya komponen listrik/penerangan kantor	1 tahun	11.182.600	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Muara Teweh	Terpenuhinya komponen listrik/penerangan kantor	1 tahun	11.182.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Teweh	Terpenuhinya ATK	1 tahun	112.045.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Teweh	Terpenuhinya ATK	1 tahun	112.045.650	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Teweh	Terlaksananya kegiatan dengan lancar	1 tahun	32.660.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Teweh	Terlaksananya kegiatan dengan lancar	1 tahun	32.660.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan pada RENCANA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Muara Teweuh	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	63.171.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Muara Teweuh	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	63.171.600	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Muara Teweuh	Terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai	12 bulan	9.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Muara Teweuh	Terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai	12 bulan	9.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	Muara Teweuh	Sinkronisasi program/kegiatan	1 tahun	403.551.650	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Muara Teweuh	Sinkronisasi program/kegiatan	1 tahun	403.551.650	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Teweuh	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur		581.957.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Teweuh	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur		581.957.000	
	Pengadaan Meubeler	Muara Teweuh	Tersedianya Perlengkapan Meubelair Kantor	2 jenis	75.582.000	Pengadaan Meubeler	Muara Teweuh	Tersedianya Perlengkapan Meubelair Kantor	2 jenis	75.582.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Muara Teweuh	Tersedianya Perlengkapan Kantor	5 jenis	506.375.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Muara Teweuh	Tersedianya Perlengkapan Kantor	5 jenis	506.375.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Muara Teweuh	Tersedianya pelayanan umum kantor		459.817.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Teweuh	Tersedianya pelayanan umum kantor		459.817.550	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Muara Teweuh	Lancarnya kegiatan surat menyurat	1 tahun	29.913.800	Penyediaan jasa surat menyurat	Muara Teweuh	Lancarnya kegiatan surat menyurat	1 tahun	29.913.800	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Muara Teweuh	Jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon berfungsi dengan baik	12 bulan	168.590.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Muara Teweuh	Jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon berfungsi dengan baik	12 bulan	168.590.000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Muara Teweuh	Peralatan kerja berfungsi dengan baik	1 tahun	17.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Muara Teweuh	Peralatan kerja berfungsi dengan baik	1 tahun	17.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Teweuh	Kantor yang bersih dan kondusif	12 bulan	244.313.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Muara Teweuh	Kantor yang bersih dan kondusif	12 bulan	244.313.750	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Teweuh	Terpeliharanya barang milik daerah PD		93.662.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Teweuh	Terpeliharanya barang milik daerah PD		93.662.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan	Muara Teweuh	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	10 unit	9.300.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Muara Teweuh	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	10 unit	9.300.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Muara Teweuh	Gedung kantor yang aman, kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik	11 unit	84.362.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Muara Teweuh	Gedung kantor yang aman, kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik	11 unit	84.362.000	
	Program Kepegawaian Daerah	Muara Teweuh	Terlaksananya Program Kepegawaian Daerah		4.956.854.150	Program Kepegawaian Daerah	Muara Teweuh	Terlaksananya Program Kepegawaian Daerah		4.956.854.150	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Muara Teweuh	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.797.686.900	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Muara Teweuh	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.797.686.900	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN	Muara Teweuh	CPNS Daerah yang diterima sesuai formasi dan kompetensi	200 Orang	300.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN	Muara Teweuh	CPNS Daerah yang diterima sesuai formasi dan kompetensi	200 orang	300.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Muara Teweuh	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Daerah	200 Orang	333.770.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Muara Teweuh	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Daerah	200 orang	333.770.000	
	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Muara Teweuh	Pembekalan CPNS berjalan dengan lancar	200 Orang	100.000.000	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Muara Teweuh	Pembekalan CPNS berjalan dengan lancar	200 orang	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan pada RENJA					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan	Muara Teweh	Penyelesaian usulan pensiun berjalan lancar	139 Orang	359.073.100	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan	Muara Teweh	Penyelesaian usulan pensiun berjalan lancar	155 Orang	359.073.100	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Muara Teweh	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Praja IPDN	4 Orang	100.000.000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Muara Teweh	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Praja IPDN	5 Orang	100.000.000	
	Pengelolaan data kepegawaian	Muara Teweh	tersedianya data kepegawaian	3.769 ASN	281.575.000	Pengelolaan data kepegawaian	Muara Teweh	tersedianya data kepegawaian	3.769 ASN	281.575.000	
	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Muara Teweh	SAPK Berjalan lancar	7 Sistem Informasi	323.268.800	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Muara Teweh	SAPK Berjalan lancar	7 Sistem Informasi	323.268.800	
	Mutasi dan Promosi ASN	Muara Teweh	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		466.670.000	Mutasi dan Promosi ASN	Muara Teweh	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN		466.670.000	
	Pengelolaan mutasi ASN	Muara Teweh	Penyelesaian Usulan Mutasi ASN	80 Orang	175.220.000	Pengelolaan mutasi ASN	Muara Teweh	Penyelesaian Usulan Mutasi ASN	80 Orang	175.220.000	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Muara Teweh	Penyelesaian usulan kenaikan pangkat (UKP)	500 Orang	221.450.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Muara Teweh	Penyelesaian usulan kenaikan pangkat (UKP)	550 Orang	221.450.000	
	Pengelolaan promosi ASN	Muara Teweh	Penyelesaian UKP, Ujian Dinas, KP penyesuaian jajah, baperjakat berjalan lancar	4 kegiatan	70.000.000	Pengelolaan promosi ASN	Muara Teweh	Penyelesaian UKP, Ujian Dinas, KP penyesuaian jajah, baperjakat berjalan lancar	4 Kegiatan	70.000.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Muara Teweh	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		2.240.127.250	Pengembangan Kompetensi ASN	Muara Teweh	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN		2.240.127.250	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Muara Teweh	Meningkatnya kapasitas ASN	70 PNS	755.650.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Muara Teweh	Meningkatnya kapasitas ASN	75 PNS	755.650.000	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Muara Teweh	Pengiriman tugas belajar/ikatan dinas dengan baik	8 PNS	100.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Muara Teweh	Pengiriman tugas belajar/ikatan dinas dengan baik	10 PNS	100.000.000	
	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Muara Teweh	CPNS Daerah yang mengikuti praalabatan	100 CPNS	500.000.000	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan	Muara Teweh	CPNS Daerah yang mengikuti praalabatan	150 PNS	500.000.000	
	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Muara Teweh	Calon Pejabat/Pejabat Yang Mengikuti Diklat struktural, sijaipi berjalan baik	100 PNS	884.477.250	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Muara Teweh	Mengikuti Diklat struktural, sijaipi berjalan baik	80 Orang	884.477.250	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Muara Teweh	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		452.370.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Muara Teweh	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		452.370.000	
	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Muara Teweh	Evaluasi hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3000 ASN	150.000.000	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Muara Teweh	Evaluasi hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3500 ASN	150.000.000	
	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Muara Teweh	PNS yang berprestasi penerima penghargaan	50 PNS	54.515.000	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Muara Teweh	PNS yang berprestasi penerima penghargaan	55 PNS	54.515.000	
	Pembinaan Disiplin ASN	Muara Teweh	Pengambilan sumpah janji PNS	2 Kegiatan	77.855.000	Pembinaan Disiplin ASN	Muara Teweh	Pengambilan sumpah janji PNS	3 Kegiatan	77.855.000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Muara Teweh	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS berjalan dengan lancar	2 Kegiatan	90.000.000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Muara Teweh	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS berjalan dengan lancar	3 Kegiatan	90.000.000	
	Pelayanan proses izin percerahan pegawai	Muara Teweh	Terlaksananya pelayanan proses izin percerahan pegawai	5 PNS	40.000.000	Pelayanan proses izin percerahan pegawai	Muara Teweh	Terlaksananya pelayanan proses izin percerahan pegawai	6 PNS	40.000.000	
	Evaluasi Disiplin ASN	Muara Teweh	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	1 Kegiatan	40.000.000	Evaluasi Disiplin ASN	Muara Teweh	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	1 Kegiatan	40.000.000	
					11.222.404.500					11.222.404.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan misi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yang bertujuan meningkatkan pembinaan administrasi kepegawaian dan kualitas diklat, meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang akan mewujudkan perilaku disiplin kerja aparatur menuju peningkatan kesejahteraan pegawai dengan menjalankan sumber daya aparatur yang transparan dan bertanggung jawab sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dalam memberikan pelayanan prima. Adapun program yang mendukung terhadap tujuan tersebut antara lain program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Hal ini sesuai dengan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yang disusun terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Formasi, Mutasi, Pensiun dan Informasi Kepegawaian;
- d. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi organisasi. Sasaran merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun.

Dalam rangka mendukung tujuan pemerintah Daerah yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital dan sasaran Meningkatnya pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara mengharapkan PNS profesional yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang saat ini sudah memasuki era digitalisasi 4.0. dapat memenuhi sasaran pokok pembangunan.

Dengan Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan SDM akan yang diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara, berdasarkan pada isu-isu strategis yaitu Peningkatan pelayanan publik khususnya terhadap urusan kepegawaian bagi ASN berbasis elektronik, Peningkatan kesejahteraan ASN Kabupaten Barito Utara menggunakan skema Reward and Punishment bagi ASN Berprestasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1.	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah ASN yang sudah terlayani menggunakan Aplikasi berbasis elektronik

	peningkatan kesejahteraan ASN Kabupaten Barito Utara menggunakan skema Reward and Punishment bagi ASN Berprestasi.	Meningkatkan kesejahteraan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan reward dari Pemerintah Daerah
--	--	--------------------------------	---

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara, maka proses pembangunan di bidang kepegawaian atau peningkatan SDA Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui program-program pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024-2026 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - 1). Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2). Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,,
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
 - 3). Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- 4). Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5). Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan aset tetap lainnya
- 6). Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7). Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan aset tetap lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan :
 - 1) Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
 - Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - Fasilitasi lembaga profesi ASN
 - Pengelolaan data kepegawaian
 - Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian

- 2) Mutasi dan promosi ASN, dengan sub kegiatan :
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - Pengelolaan promosi ASN
- 3) Pengembangan kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 - Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
 - Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN
- 4) Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, dengan sub kegiatan :
 - Evaluasi hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur
 - Pembinaan disiplin ASN
 - Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
 - Pelayanan proses izin perceraian pegawai
 - Evaluasi Disiplin ASN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun pendanaan indikatif Rencana Kerja (Renja) Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Barito Utara
Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 03	KEPEGAWAIAN								
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Program pelayanan Administrasi perkantoran	Muara Teveh		6.265.550.350				6.725.151.800
5 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Muara Teveh		23.761.300				27.324.000
5 03 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA/DPA SKPD dan RKPA/DPPA SKPD	Muara Teveh	4 dokumen	11.880.650			4 dokumen	13.662.000
5 03 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	Muara Teveh	5 dokumen	11.880.650			5 dokumen	13.662.000
5 03 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	Muara Teveh		4.390.141.000				5.026.283.500
5 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan	Muara Teveh	12 bulan	4.216.285.000			12 bulan	4.848.728.500
5 03 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan berjalan baik	Muara Teveh	12 bulan	159.180.000			12 bulan	160.680.000
5 03 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Muara Teveh	1 dokumen	4.892.000			1 dokumen	5.625.000
5 03 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	Muara Teveh	2 dokumen	4.892.000			2 dokumen	5.625.000
5 03 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Prognosis realisasi anggaran	Muara Teveh	1 dokumen	4.892.000			1 dokumen	5.625.000
5 03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur	Muara Teveh		84.000.000				98.125.000
5 03 01 2 05 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terpenuhiya pakaian dinas	Muara Teveh	32 stel	44.000.000			32 stel	48.125.000
5 03 01 2 05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	PNS Daerah yang mengikuti diklat teknis	Muara Teveh	8 kali	40.000.000			8 kali	50.000.000
5 03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Muara Teveh		632.211.500				686.507.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(19)	(10)
5 03 01 2 06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik/penerangan kantor	Muara Teweh	1 tahun	11.182.600			1 tahun	12.850.000
5 03 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya ATK	Muara Teweh	1 tahun	112.045.650			1 tahun	128.850.000
5 03 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya kegiatan dengan lancar	Muara Teweh	1 tahun	32.660.000			1 tahun	37.559.000
5 03 01 2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Muara Teweh	1 tahun	63.171.800			1 tahun	72.650.000
5 03 01 2 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai	Muara Teweh	12 bulan	9.600.000			12 bulan	11.400.000
5 03 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SH	Sinkronisasi program/kegiatan	Muara Teweh	1 tahun	403.551.850			1 tahun	423.198.000
5 03 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur	Muara Teweh		581.957.000				285.297.500
5 03 01 2 07 05	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Perlengkapan Meubelair Kantor	Muara Teweh	2 jenis	75.582.000			2 jenis	78.485.000
5 03 01 2 07 07	Pengadaan Asel Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Muara Teweh	5 jenis	506.375.000			5 jenis	206.812.500
5 03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan umum kantor	Muara Teweh		459.817.550				494.398.500
5 03 01 2 08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Kegiatan surat menyurat	Muara Teweh	1 tahun	29.913.800			1 tahun	34.400.000
5 03 01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon berfungsi dengan baik	Muara Teweh	12 bulan	168.590.000			12 bulan	193.878.500
5 03 01 2 08 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kerja berfungsi dengan baik	Muara Teweh	1 tahun	17.000.000			1 tahun	20.000.000
5 03 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor yang bersih dan kondusif	Muara Teweh	12 bulan	244.313.750			12 bulan	246.120.000
5 03 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah PD	Muara Teweh		93.662.000				107.216.300
5 03 01 2 09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	Terpenuhinya perizinaan kendaraan dinas/operasional	Muara Teweh	10 unit	9.300.000			10 unit	10.200.000
5 03 01 2 09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gedung kantor yang aman, kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik	Muara Teweh	11 unit	84.362.000			11 unit	97.016.300
5 03 02	Program Kepegawalan Daerah	Terlaksananya Program Kepegawalan Daerah	Muara Teweh		4.956.854.150				5.650.553.000
5 03 02 2 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN	Muara Teweh		1.797.686.900				1.850.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5 03 02 2 01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	CPNS Daerah yang diterima sesuai formasi dan kompetensi	Muara Teweh	200 Orang	300.000.000			200 Orang	300.000.000	
5 03 02 2 01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Daerah	Muara Teweh	200 Orang	333.770.000			200 Orang	350.000.000	
5 03 02 2 01 04	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Pembekalan CPNS berjalan dengan lancar	Muara Teweh	200 Orang	100.000.000			200 Orang	115.000.000	
5 03 02 2 01 06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Penyelesaian usulan pensiun berjalan lancar	Muara Teweh	155 Orang	359.073.100			155 Orang	360.000.000	
5 03 02 2 01 08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Praja IPDN	Muara Teweh	5 Orang	100.000.000			5 Orang	110.000.000	
5 03 02 2 01 11	Pengelolaan data kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian	Muara Teweh	3.769 ASN	281.575.000			3.769 ASN	290.000.000	
5 03 02 2 01 12	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	SAPK Berjalan lancar	Muara Teweh	7 Sistem Informasi	323.268.800			7 Sistem Informasi	325.000.000	
5 03 02 2 02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Muara Teweh		466.670.000				794.903.000	
5 03 02 2 02 01	Pengelolaan mutasi ASN	Penyelesaian Usulan Mutasi ASN	Muara Teweh	80 Orang	175.220.000			80 Orang	201.503.000	
5 03 02 2 02 02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Penyelesaian usulan kenaikan pangkat (UKP)	Muara Teweh	550 Orang	221.450.000			550 Orang	243.400.000	
5 03 02 2 02 03	Pengelolaan promosi ASN	Penyelesaian UKP, Ujian Dinas, KP penyesuaian ijazah, baperjakat berjalan lancar	Muara Teweh	4 kegiatan	70.000.000			4 kegiatan	350.000.000	
5 03 02 2 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Muara Teweh		2.240.127.250				2.535.650.000	
5 03 02 2 03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas ASN	Muara Teweh	75 PNS	755.650.000			75 PNS	1.335.650.000	
5 03 02 2 03 04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Pengiriman tugas belajar/ikatan dinas dengan baik	Muara Teweh	10 PNS	100.000.000			10 PNS	100.000.000	
5 03 02 2 03 05	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	CPNS Daerah yang mengikuti prajabatan	Muara Teweh	150 CPNS	500.000.000			150 CPNS	500.000.000	
5 03 02 2 03 06	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Calon Pejabat/Pejabat Yang Mengikuti Diklat struktural, silajpti berjalan baik	Muara Teweh	80 PNS	884.477.250			80 PNS	600.000.000	
5 03 02 2 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Muara Teweh		452.370.000				470.000.000	
5 03 02 2 04 03	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Evaluasi hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Muara Teweh	3500 ASN	150.000.000			3500 ASN	150.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5 03 02 2 04 06	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	PNS yang berprestasi penerima penghargaan	Muara Teweh	55 PNS	54.515.000		55 PNS		55 PNS	55.000.000
5 03 02 2 04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Pengambilan sumpah janji PNS	Muara Teweh	3 Kegiatan	77.855.000		3 Kegiatan		3 Kegiatan	80.000.000
5 03 02 2 04 08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS berjalan dengan lancar	Muara Teweh	3 kegiatan	90.000.000		3 kegiatan		3 kegiatan	95.000.000
5 03 02 2 04 09	Pelayanan proses izin perceraihan pegawai	Terlaksananya pelayanan proses izin perceraihan pegawai	Muara Teweh	6 PNS	40.000.000		6 PNS		6 PNS	45.000.000
5 03 02 2 04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Muara Teweh	1 Kegiatan	40.000.000		1 Kegiatan		1 Kegiatan	45.000.000
					11.222.404.500					12.375.704.800

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang akan dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan pembangunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara yang diuraikan dalam program dan kegiatan. Rencana kerja tahunan ini sebagai acuan dalam melaksanakan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara berusaha memahami faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan arah yang dituju agar sasaran rencana kerja berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini dibuat sangat sederhana dan tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Namun dengan berbagai keterbatasannya diharapkan cukup memadai untuk dijadikan bahan kontribusi bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara untuk tahun yang akan datang.

Muara Teweh, Juni 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,



H. SRI HARTATI, S.Pi., M.IP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 200604 2 003